

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kinerja Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Bantul**

Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 15-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.

Keberadaan anak jalanan di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan dasar undang-undang 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh Negara” membuat pemerintah dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai institusi di bidang penanganan anak jalanan dan kegiatan sosial untuk masyarakat diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sehingga memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya bagi anak jalanan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja dari Dinas Sosial Bantul, menurut Kumorontomo (2011:23) menjelaskan beberapa indikator yang

digunakan dalam menilai kinerja pelayanan publik, yaitu efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap.

a. Efisiensi

Faktor efisiensi yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Faktor ini menyangkut ketersediaan tenaga pengajar, ketersediaan waktu dan biaya pelatihan yang diperlukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul. Tolak ukur yang digunakan dalam indikator efisiensi dalam penelitian ini adalah memaksimalkan sumber daya manusia dan memaksimal sumber daya finansial. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.1

Indikator Efisiensi

<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kesimpulan</b>
1. Memaksimalkan sumber daya manusia.	Optimalisasi SDM	Berdasarkan laporan kinerja dinas Sosial Kab. Bantul 2018 jumlah SDM keseluruhan 35 PMKS. Dalam bidang anak jalanan mempunyai 3 SDM yang seharusnya data ideal dalam menanagani anak jalanan 5 sdm dalam 1 bidang mempunyai 3-5 staf, sedangkan dinas sosial	Tidak Efisien

		mempunyai 3 bidang sdm tetapi hanya mempunyai 2 staf sehingga bisa dikatakan overload (kelebihan kerja) SDM dibidang anak jalanan.	
2. Memaksimal sumber daya finansial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan capaian anggaran dalam penanggulangan masalah anak jalanan</li> <li>- Anggaran untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anak jalanan</li> </ul>	Jumlah anggaran yang terealisasi keseluruhan PMKS adalah Rp. 298,733,000. Sedangkan anggaran untuk meningkatkan kualitas Anak Jalanan Rp .40.000.000 target 89. Dengan uang itu sebagaimana dinas Sosial sangat memaksimalkan layak secara Finansial.	Tidak Efisien

Berdasarkan wawancara dari Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan anak jalanan. mengenai ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah hasil wawancara :

*“Berdasarkan wawancara dari ibu nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan anak jalanan. Walaupun bidang anak jalanan*

*mengalami kekurangan SDM tetapi itu bukan menjadi kendala karena Dinas Sosial Bantul sudah dibantu oleh pihak satpol PP dan kepolisian untuk menangani anak jalanan.*

Berdasarkan wawancara dari Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan anak jalanan. mengenai ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah hasil wawancara :

*“Ketersediaan pelatih dan pengajar yang berkompeten dalam pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul mampu menyediakan pengajar yang berkualitas agar anak jalanan mendapatkan ilmu yang berkualitas. Tetapi Tenaga pengajar yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak cukup memadai karena jumlah tenaga pengajar di Dinsos kabupaten bantul sangat kurang dan tidak memiliki skill dalam menanganani anak jalanan karena dari itu SDM dinas sosial butuh Diklat dan tenaga pengajar lagi agar bisa lebih efisien dalam menanganani anak jalanan di Kabupaten Bantul.. (Wawancara dengan ibu Rosnita irawati)*

Berdasarkan wawancara dari Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan anak jalanan. mengenai ketersediaan tenaga pengajar yang berkompeten dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah hasil wawancara :

*Dengan adanya uang anggaran yang diterima untuk meningkatkan kualitas sumber daya finansil. Jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Sumber keungan jangka pendek tidak selalu dapat disediakan dengan segera. Oleh karena itu penggunaan danna tersebut sering dibatasi.*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki kekuarangan SDM dalam menangani anak jalanan terutama pada bagian staff PMKS (anak Jalanan). Dengan demikian Kenaikan anak jalan di Kabupaten Bantul dari Tahun 2017-2018 masih ada peningkatan padahal dari segi anggaran juga masih belum mencukupi seluruhnya untuk penanganan anak jalanan Di kabupaten Bantul.

Berdasarkan wawancara mengenai biaya pelatihan, berikut adalah kutipannya :

*“Biaya pelatihan udah di anggarkan dalam APBN dan APBD untuk mengatasi permasalahan anak jalanan masih belum mencukupi (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan SDM dan capaian anggaran yang di dapatkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul masih belum efisien karna masih kurangnya SDM untuk mengatasi anak jalanan walaupun secara SOP sudah maksimal tetapi dengan kemaksimalan dari pihak dinas kewalahan untuk mengatasi anak jalanan sehingga terjadi overload walaupun sudah dibantu dari pihak satpol pp dan kepolisain. Dari segi anggaran secara finansial walaupun mempunyai

kenaikan sekitar 40.000.000 itu masih belum cukup untuk mengatasi secara finansial karena kepegawaian butuh Diklat untuk mengatasi anak jalanan karena sebagian SDM tidak mempunyai keahlian dalam menangani Anak jalanan saat Terjun kelapangan.

b. Efektifitas

Faktor efektifitas yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Faktor ini menyangkut efektifitas segala ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku didalam organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya anak jalanan. Pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan dituntut untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak BAB II Pasal 4 adalah, menjamin Pemenuhan Hak Anak yang meliputi 1) hak sipil dan kebebasan, 2) hak pengasuhan lingkungan keluarga dan keluarga pengganti, 3) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, 5) hak perlindungan khusus. Tolak ukur yang digunakan dalam indikator efektifitas dalam penelitian ini adalah sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.2

### Indikator Efektifitas

<b>TolakUkur</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kesimpulan</b>
Sesuai dengan tujuan	Berkurangnya anak jalanan	Jumlah anak jalanan tahun 2017 mengalami penurunan dari 106 menjadi 82 sedangkan pada tahun 2018 justru mengalami peningkatan kembali menjadi 114	Belum efektif
Tepatsasaran.	Anak jalanan dengan jumlah 146 orang	Anak jalanan dengan jumlah 146 orang	efektif

*Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019*

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa program Dinas Kabupaten Bantul tahun 2017-2018 adalah mengurangi jumlah anak jalanan melalui peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Bila ditinjau dari segi tujuan dimana tujuan utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal menangani anak jalanan adalah berkurangnya jumlah anak jalanan, jumlah anak jalanan di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya

anak jalanan yang berasal dari kota Yogyakarta serta kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bermigrasi ke Kabupaten Bantul sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan kembali jumlah anak jalanan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan tersebut sudah tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan Anak Jalanan mengenai tujuan kebijakan perlindungan anak yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, berikut adalah kutipannya :

*”Selama ini yang menjadi tujuan kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Bantul yaitu melindungi anak agar anak bertumbuh kembang dan perlindungan anak yang mengacu pada kepada Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menjalankan tujuan kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai keberhasilan dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Selama ini dinas sosial Kabupaten Bantul sudah menjalankan program pembinaan Anak Jalanan dalam Kabupaten Bantul Yogyakarta, 1) dimana tujuannya untuk meningkatnya keterampilan anak jalanan. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Bantul berkerja sama dengan I-PSM (Ikatanpekerja social masyarakat) se desa Kabupaten Bantul, 2) peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan, 3) Pendekatan Anak Jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta berkerja sama dengan Satpol PP dan I-PSM se desa Kabupaten Bantul” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta”*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program pembinaan Anak Jalanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah meningkatkan keterampilan anak jalanan, 2) peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Jalanan, 3) Pendekatan Anak Jalanan

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai ketetapan/sasaran program pembinaan dinas sosial dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Ketepatan sasaran program diberikan kepada anak yang masih hidup di jalan yang masih berhubungan langsung dengan orangtuanya, anak yang hidup di jalanan tidak berhubungan langsung dengan orangtua, anak yang rentan untuk turun di jalan, orang tua anak jalanan, dan masyarakat” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran program yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah 1) anak yang masih hidup di jalan yang masih berhubungan langsung dengan orangtuanya, 2) anak yang hidup di jalanan tidak berhubungan langsung dengan orangtua, 3) anak yang rentan untuk turun di jalan, 4) orang tua anak jalanan dan masyarakat.

c. Keadilan

Pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan seyogyanya haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara merata di distribusikan kepada kelompok sasaran. Tolak ukur dalam indikator keadilan adalah ketercukupan dalam penanganan anak jalanan dan keadilan penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul.

Tabel 3.3

Indikator Keadilan

<b>TolakUkur</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kesimpulan</b>
1. Ketercukupan dalam penanganan anak jalanan di Kabupaten	Anak jalanan	Bahwa dinas social dalam keadilan yang dimaksud saat dilakukannya penanganan anak jalanan bahwa anak jalanan dilakukan	Belum maksimal

Bantul		bimbingan dan sudah diberikan keadilan berupa diberikannya bantuan makanan pada saat penyuluhan terhadap anak jalanan, tetapi dari segi makanan dan pakai yang dibutuhkan masih kekurangan karna kurang biayaanggaran yang diberikan.	
2. Kepantasan penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul.	Anak jalanan	Dalam capaian kepantasan dinsos sudah bekerja sama dengan polisi dan satpol pp dalam penanganan anak jalanan itu setelah anak jalanan itu dibawa dilakukan penyuluhan dan bimbingan sehingga dinsos dan jajarannya sudah sesuai SOP yang ada mereka tidak dibiarkan kehausan, kelaparan dan ditelantarkan jadi anak jalanan ini sudah layak diberikan sesuai dengan SOP	maksimal

*Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019*

Berdasarkan hasil wawancara : “ memang benar kendala pada Dinas Sosial pada Kabupaten Bantul ini mengalami kendala SDA dan SDM dengan begitu kami juga merasakan beban kerja kami yang banya tidak bisa maksimal dalam penanganan anak Jalanan”(wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm)

Kesimpulan pada Tabel 3.3 diketahuibahwadari segi indicator keadilan menggunakan tolak ukur ketercukupan dalam penanganan anak jalanan dan kepantasan penanganan anak jalanan di Kabupaten

Bantul. Serta target Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah memaksimalkan anggaran dan SDM. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul diketahui jumlah anggaran yang sudah di berikan kepada anak jalanan sesuai dengan target serta SDM yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah cukup memadai. Bahwa dari segi kepantasan sudah sangat panatas anak jalanan di perlakukan sesuai dengan SOP yang sehingga anak jalanan layak diperlakukan dengan baik.

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai penanganan yang merata terhadap anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Dinas Sosial telah banyak membantu anak jalanan, melalui program keterampilan dan pelatihan untuk membantuanak jalanan yang ada di seluruh Kabupaten Bantul untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik, walaupun belum maksimal tetapi ilmu yang didapat selama pembinaan sangat bermanfaat bagianak jalanan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinas sosial telah banyak membantu anak jalanan, melalui program keterampilan dan pelatihan untuk membantu anak jalanan

yang ada di seluruh Kabupaten Bantul untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik walaupun upaya yang dilakukan belum maksimal

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai ketercukupan bantuan dan materi pelatihan, berikut adalah kutipannya :

*“Bantuan yang kami berikan sudah cukup baik, anak jalanan dapat diberikan materi pelatihan dan keterampilan di rumah singgah yang ada di Kota Yogyakarta yang nantinya dapat memberikan pendidikan dan bantuan materil berupa makanan, minuman dan pakaian layak pakai. Materi pelatihan yang kami berikan sudah disesuaikan dengan kriteria yang cocok diberikan buat anak jalanan yang ada di rumah singgah di Kota Yogyakarta” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan yang di berikan dinas sosial sudah cukup baik, bantuan materil berupa makanan, minuman dan pakaian layak pakai dan bantuan non materil berupa pelatihan dan pendidikan keterampilan. Materi pelatihan yang kami berikan sudah disesuaikan dengan kriteria yang cocok diberikan buat anak jalanan.

#### d. DayaTanggap

Tabel 3.4

## Indikator Daya Tanggap

<b>Tolak Ukur</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>	<b>Kesimpulan</b>
Responsivitas Dinas Sosial dan penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasi razia terhadap anak jalanan</li> <li>2. Rehabilitas sosial penanganan anak jalanan</li> </ol>	Masih ada beberapa anak jalanan yang terlantar	Belum maksimal

*Sumber: Diolah oleh Penulis Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa dari segi indikator daya tanggap menggunakan tolak ukur responsivitas Dinas Sosial dan penanganan anak jalanan di Kabupaten Bantul. Target dari indikator tersebut adalah operasi razia terhadap anak jalanan serta rehabilitasi sosial penanganan anak jalanan. Namun hasil capaiannya masih belum maksimal karena masih ada beberapa anak jalanan yang terlantar.

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menangani anak jalan, berikut kutipan wawancaranya:

*“Dari segi responsivitas Dinas Sosial berusaha cepat tanggap dalam menangani masalah anak jalanan melalui operasi razia yang dilakukan, namun terkadang meskipun sudah di razia anak jalanan tersebut tetap kembali ke jalanan, kembali lagi kita Dinas Sosial tidak bisa memaksimalkan kinerja karena keterbatasan SDA dan SDM” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta).*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah berusaha cepat tanggap dalam menangani anak jalanan contohnya melalui operasi razia namun anak jalanan yang sudah terjaring razia tersebut pada akhirnya kembali lagi kejalanan hal ini dikarenakan yaitu sikap atau mind set anak jalanan yang hidup bebas dan tidak mau terikat. Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu meningkatkan usahanya dengan mengubah mindset anak jalanan, agar mau untuk dibina dan terwujud kesejahteraan dirinya. Selain kendala tersebut, kendala terbatasnya tenaga sosial lapangan dalam pembimbingan turut andil pada buruknya responsivitas pemerintah dalam penanganan anak jalanan.

Program utama yang diberikan kepada anak jalanan adalah pembinaan. Kegiatan yang sesuai dengan misi tersebut untuk anak terlantar, yang di mana juga termasuk anak jalanan yaitu:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar.
- 2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagian terlantar.
- 3) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar.
- 4) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar.
- 5) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar.
- 6) Pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial.

Kegiatan tersebut dinilai sudah memenuhi visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul tersebut belum mencapai tujuan yang sebenarnya

## 2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan Di Kabupaten Bantul

### a. Faktor Individu

Tabel 3.5

#### Sumberdaya Manusia

No	Golongan /ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah
		L	P	SD	SM	SMA/K	Diploma	S1	S2	
1	II/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II/B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	II/C	3	-	-	-	3	-	-	-	3
4	II/D	2	1	-	-	1	2	-	-	3
5	III/A	-	1	-	-	-	1	-	-	1
6	III/B	6	5	-	-	9	-	2	-	11
7	III/C	1	3	-	-	-	-	4	-	4
8	III/D	3	4	-	-	-	-	6	-	6
9	IV/A	3	5	-	-	-	-	2	6	8
10	IV/B	1	1	-	-	-	-	-	2	2
11	IV/C	1	-	-	-	-	-	1	-	1

	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>39</b>
--	---------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

*Sumber :DinasSosialKabupaten Bantul DIY*

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa komposisi personil terbanyak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada pada golongan III sebanyak 11 orang. Dengan lulusan pendidikan SMA terbanyak 9 orang dan S1 sebanyak 2 orang .Sehingga secara kualitas kompetensi SDM masih dirasa kurang untuk melaksanakan tugas.

Merupakan faktor yang dimiliki masing-masing individu yang berupa keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen. Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai keterampilan yang dimiliki individu, berikut adalah kutipannya :

*“Tenaga pengajar yang kita miliki mempunyai kompeten yang baik dalam mengajari anak jalanan mengenai keterampilan dan pelatihan yang cocok diberikan pada anak jalanan tersebut(Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta”*

*“Tenaga pengajar yang mengajarkan kita sangat berkompeten di bidangnya”  
(Wawancara dengan ibu Nitakrit R, S.FARM di Kabupaten Bantul”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga pengajar yang dimiliki oleh Dinas sosial sangat berkompeten di bidangnya dalam mengajari pelatihan dan keterampilan kepada anak jalanan.

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R,S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai motivasi dan yang dimiliki individu, berikut adalah kutipannya :

*“Motivasi yang dimiliki tenaga kami sangat tinggi untuk mengajari ilmu yang dimiliki baik itu keterampilan dan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan kelak akan dipergunakan untuk kehidupan mereka serta berkomitmen untuk mengurangi jumlah anak jalanan di Kabupaten Bantul” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)”*

*“Saya memiliki motivasi agar dapat merubah hidup saya agar tidak dijalan lagi dan berkomitmen tidak akan kembali lagi ke jalanan” (Wawancara dengan anak Jalanan di Kabupaten Bantul)”*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga yang dimiliki oleh dinas sosial memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan ilmu yang dimiliki kepada anak jalanan dan berkomitmen untuk mengurangi angka anak jalanan di Kabupaten Bantul. Selain itu anak jalanan yang diberikan pelatihan dan keterampilan juga memiliki motivasi untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi serta memiliki komitmen tidak akan lagi kembali ke jalanan.

#### b. Faktor Kepemimpinan

Merupakan faktor yang dimiliki seorang pemimpin untuk mendorong dan memberikan support kepada pegawai dalam menjalani suatu aktivitas dan kegiatan yang dimilikinya. Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai kualitas dorongan

yang dimiliki pemimpin dan kualitas dorongan tenaga pengajar kepada anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Dorongan yang diberikan pemimpin sangat baik karena pemimpin kami mempunyai target dalam mengentaskan permasalahan anak jalanan yang ada di Kabupaten Bantul serta dorongan kami kepada anak jalanan sudah cukup baik karena dengan dilihat dari pelatihan-pelatihan serta pendidikan keterampilan yang telah kita berikan kepada anak jalanan itu mau merubah cara hidupnya dan tidak mau kembali lagi ke jalanan” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)”*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dorongan yang diberikan pemimpin sangat baik karena pemimpin kami mempunyai target dalam mengentaskan permasalahan anak jalanan yang ada di Kabupaten Bantul serta dorongan kami kepada anak jalanan sudah cukup baik karena dengan dilihat dari pelatihan-pelatihan serta pendidikan keterampilan yang telah kita berikan kepada anak jalanan.

Berdasarkan wawancara Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai dukungan yang diberikan pemimpin kepada tenaga pengajar untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Dukungan yang diberikan pemimpin kepada kami yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kami dalam menjalankan program penanganan anak jalanan. dukungan berupa kendaraan operasional, kerjasama-kerjasama yang selama ini udah terjalin” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan pemimpin kepada kami yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana yang berupa berupa kendaraan operasional, kerjasama-kerjasama yang selama ini udah terjalin.

c. Faktor Kerja Sama Tim

Merupakan faktor yang timbul dari dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja. Berdasarkan wawancara ke Ibu Nitakrit R, S.Farm selaku penanggung jawab dalam penanganan mengenai kerja sama tim dalam penanganan anak jalanan, berikut adalah kutipannya :

*“Kerja sama team kami sudah baik meskipun sumber daya yang kami miliki masih kurang dalam memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada anak jalanan. selain itu juga kerja sama kami dengan instansi lain juga sudah berjalan dengan baik seperti dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menenrtibkan anak jalanan” (Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Kabupaten Bantul Yogyakarta)”*

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama team kami sudah baik meskipun sumber daya yang kami miliki masih kurang dalam memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada anak jalanan. Kerja sama yang dilakukan Dinas Sosial dengan instansi lain juga sudah berjalan dengan baik seperti kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.